

## PELUNCURAN APLIKASI DEPO SBN

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Yossianis Marciano (kiri) bersama Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT PBM Sarana Bandar Nasional Murdiyoto (kanan) menunjukkan aplikasi Depo SBN saat peluncurannya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/6). Aplikasi yang diluncurkan oleh PT PBM Sarana Bandar Nasional itu bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa baik pengirim barang maupun penerima barang.



FOTO/ANT

SUDAH BISA DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

## Presiden Jokowi Perintahkan 842 Produk E-Katalog Dicoret

Seluruh 842 produk itu kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemanfaatan produk dalam negeri selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh untuk mencoret sebanyak 842 produk impor dalam e-katalog.

Seluruh 842 produk itu kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemanfaatan produk dalam negeri selain mendorong pertumbuhan ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebelumnya produksi di dalam negeri itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop. Kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasangi di e-katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKB," kata Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana

Negara, Jakarta, Selasa (14/6).

Presiden mencontohkan, mesin jahit low speed harga impor sebesar Rp 13 juta dan harga produk dalam negeri Rp 12,8 juta. "Apa sih bedanya? Lebih murah, jelas. Sudah tutup mata, beli yang PDN (produk dalam negeri) itu. Nggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih. Saya senang warna putih, enggak ada. Beli yang putih," katanya.

Disebutkan, harga nasal oxygen cannula (pipa oksigen) impor adalah Rp 8.300, sedangkan harga produk dalam negeri sebesar Rp 6.900. "Beli impor yang saya cek, beli impor. Alasannya ada saja, Kualitasnya, Pak. Speknnya enggak pas. Kayak kita ini orang enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP seperti ini dicek. Pakai yang PDN ini," kata Presiden Jokowi.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa harga mekanik impor Rp 22.900.000 per unit dan produk dalam negeri harganya Rp 28.000.000. "Beli tetap

yang PDN. Jangan alasannya lebih murah yang impor, ndak, hanya terpaut sedikit. Tetap beli yang produk dalam negeri karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Nggak ada alasan," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menceritakan pengalaman buruk sekaligus menjenkelkan yang dialaminya pada lima tahun lalu. Disebutkan, sudah memerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk beli pipa ternyata dengan berbagai alasan pihak BUMN membeli produk impor.

"Enggak ada speknnya di dalam negeri, Pak. Speknnya ini, Pak, nomornya ini, ukuran-

nya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa sesulit ini sih membuat pipa. Eh, saya ke pabrik pipa, Pak, semuanya ada, Pak. Bapak mau cari apa, ada. Ukuran apa, ada. Kualitas apa, ada. Ini kita ekspor semuanya, Pak, ke Jepang, ke Amerika, dan ke Eropa. Lho, lho, lho, lho. Yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor. Ini kan, sekali lagi, kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," katanya.

Ia mengatakan praktik-praktik curang seperti ini yang harus dikawal dan diawasi oleh BPKP dan APIP. Sebab, katanya, pembelian produk-produk dalam negeri selain

men-trigger pertumbuhan ekonomi, juga membuka lapangan kerja baru. "Kalau ada pabrik kecil yang biasanya hanya melayani kapasitas 1.000, karena ada pesanan dari Pemda dan pesanan dari pemerintah pusat 10.000, ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Nggak usah cari investor-investor dari luar, kalau ini berkembang. Artinya, APBN APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini," kata Presiden Jokowi. • vit

## Indonesia Incar Pasar CPO dan Minyak Goreng di Pakistan

JAKARTA (IM) - Indonesia dan Pakistan terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komperhensif, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi kedua negara. Salah satu langkah strategis yang akan dijalankan Indonesia yaitu mengakselerasi perluasan pasar ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng sawit ke Pakistan.

"Pemerintah telah memutuskan membuka ekspor minyak goreng kembali, setelah melihat kondisi pasokan yang terpenuhi di pasar domestik dan penurunan harga minyak goreng curah saat ini. Oleh karenanya, Pakistan bisa menjadi pasar potensial," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (14/6).

Menperin menjelaskan, pemerintah sedang menjalankan program percepatan distribusi CPO, Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), dan Used Cooking Oil (UCO) melalui ekspor sejak 7 Juni sampai 31 Juli 2022. Hal itu, kata

dia, guna optimalisasi dan stabilisasi produksi dan rantai perdagangan CPO, RBDPO, dan UCO.

Program tersebut berlaku bagi seluruh ekspor, dengan alokasi ekspor ditetapkan sebesar 1 juta ton, dan setiap eksportir yang mengikuti program diberikan alokasi paling sedikit 10 ton kelipatannya. "Saya yakin terbitnya regulasi terkait ini dapat mempercepat impor CPO dan turunannya ke Pakistan," ujar Agus.

Dia berharap, pertemuan bilateral ini juga dapat memperluas hubungan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi, yaitu dengan kelanjutan perundingan Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA).

Hal ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kedua negara pasca-pandemi Covid-19.

"Indonesia punya potensi besar, dengan jumlah UMKM sebanyak 65 juta unit atau 99 persen mendominasi dari total unit usaha yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi hingga 60 persen

terhadap PDB nasional," jelas dia.

Selain itu, UMKM di Indonesia menyerap tenaga kerja 119,6 juta lebih orang atau menyumbang sekitar 96,92 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Menperin optimistis, peningkatan kerja sama di sektor industri dengan Pakistan akan mendorong kinerja ekspor nasional.

Total perdagangan kedua negara mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,65 persen selama 2017-2021. Lalu mencatat pertumbuhan positif sebesar 41,77 persen selama 2021-2022.

Sementara, penanaman modal dari investor Pakistan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 telah menggelontorkan total dana sebesar 5,45 juta dolar AS bagi 155 proyek. Sektor-sektor yang merealisasikan investasinya tersebut, antara lain industri makanan, tekstil, kayu, serta kimia dan farmasi.

"Minyak sawit dan minyak sawit mentah adalah produk dengan potensi ekspor terbesar dari Indonesia ke Pakistan," ungkap Agus. • vit



IDN/ANTARA

## PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN TOL BECAKAYU SEKSI 2A

Foto udara pembangunan konstruksi Jalan Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu) Seksi 2A di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/6). Pembangunan konstruksi Jalan Tol Becakayu Seksi 2A ditargetkan selesai pada Juni 2022.

## Usai Bukalapak dan GoTo, Blibli Bakal Ikut Melantai di Bursa Saham

JAKARTA (IM) - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Djusitni Septiana mengatakan, sebanyak 57 perusahaan masuk daftar rencana atau pipeline penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham OJK hingga 11 Juni 2022. Adapun salah satu calon emiten yang akan melantai adalah Blibli.

Dia menjelaskan, hingga kini memang belum ada perusahaan decacorn dan unicorn yang melantai di bursa. Namun ketika memutuskan mencatatkan saham, nilai penawaran atau offering perusahaan tersebut cukup tinggi, seperti GOTO milik Gojek Tokopedia.

"Pada saat mereka (unicorn dan decacorn) offering cukup tinggi sampai triliunan seperti GOTO, dan sebentar

lagi Blibli," katanya, Jakarta, Selasa (14/6).

Adapun nilai indikasi rencana listing 57 perusahaan yang akan melantai di bursa adalah senilai Rp18,14 triliun. Sebanyak 8 di antaranya datang dari sektor teknologi dengan nilai indikasi Rp7,3 triliun.

Djustini berharap seluruh perusahaan yang berencana listing bisa berjalan efektif tahun ini. Namun demikian, dia tidak dapat memastikan apakah keseluruhan perusahaan bisa melakukan pencatatan tahun ini.

"Jadi kita berharap semuanya bisa efektif tahun ini, tapi ini tidak bisa kami pastikan karena ketidakpastiannya cukup tinggi. Dipengaruhi faktor eksternal dan internal perusahaan itu sendiri," tandasnya. • vit



IDN/ANTARA

## TARIF LISTRIK INDUSTRI DAN BISNIS TAK IKUT NAIK

Seorang pekerja menyetrিকা pakaian pelanggan di salah satu tempat penyedia jasa penatu (laundry) di Jakarta, Selasa (14/6). Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan tarif listrik pelanggan golongan industri dan bisnis tak ikut mengikuti kenaikan tarif listrik di atas 3.500 volt ampere (VA) atau hanya berlaku untuk golongan pelanggan nonsubsidi karena golongan industri dan bisnis dipertimbangkan sebagai pendorong ekonomi.



## Kunjungan Wisman Naik 5 Kali Lipat, Sandiaga Optimistis Target 2022 Tercapai

JAKARTA (IM) - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia per April 2022 mencapai 11 ribu lebih kunjungan, naik lima kali lipat dibanding bulan yang sama tahun lalu. Dirinya pun optimistis target kunjungan wisman tahun ini bakal tercapai.

Sandiaga mengatakan, pencapaian tersebut menunjukkan pemulihan pariwisata nasional seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang kian terkendali.

Kunjungan wisman sepanjang April 2022 jika dibandingkan bulan sebelumnya pun mengalami peningkatan 172 persen. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia didominasi oleh turis dari lima negara yaitu Australia sebanyak 14 persen, Singapura 11, 4 persen, Malaysia 7,8 persen, India 6,1 persen dan Inggris 5,5 persen.

Pihaknya pun optimistis data kunjungan wisatawan pada Mei 2022 dan bulan-bulan selanjutnya akan meningkat secara signifikan. Ia pun memprediksi puncak peningkatan wisatawan ini akan jatuh di bulan Juli dan Agustus 2022.

"Mudah-mudahan jika situasi pandemi terkendali dan jumlah penerbangan ke Indonesia, terutama Bali bisa terus ditingkatkan," kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Selasa 14/6.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun ini menargetkan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 550 juta, kunjungan wisatawan mancanegara 1,8 sampai 3,6 juta kunjungan serta realisasi investasi pariwisata di target sebesar 2,5 miliar dolar AS.

Sandiaga mengatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berkoordinasi dengan

pihak-pihak terkait, baik Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan internasional maupun nasional untuk membuka dan menambah frekuensi penerbangan ke Indonesia, terutama Bali.

"Kami ingin melakukan peninjauan peluang-peluang dibukanya jalur dan rute baru misalnya Wakatobi, Belitung, dan beberapa rute-rute yang sekarang membutuhkan penerbangan tambahan," kata Menparekraf.

Kendati demikian, ia menyadari sangat banyak tantangan atau kendala yang dihadapi untuk membuka rute baru dan menambah jadwal penerbangan. Misalnya terbatasnya jumlah pesawat. Walaupun permintaan meningkat, namun jumlah pesawat masih sangat terbatas imbas pandemi yang membuat pesawat-pesawat tersebut dirumahkan.

"Dan maskapai penerbangan saat ini juga telah melakukan revitalisasi, sekarang ada sekitar 350 pesawat yang beroperasi dari 550. Ini yang tentunya perlu kita sika karena banyak yang masih mengalami maintenance," kata Menparekraf.

Selain itu, tidak semua negara menerapkan kebijakan pembukaan border misalnya China yang masih belum membuka perbatasannya. Wisatawan mancanegara asal Tiongkok sendiri sangat potensial dan sangat signifikan untuk Indonesia.

"Oleh karena itu kami akan terus menjaga dan merawat momentum kebangkitan kita, kunjungan wisatawan yang semakin meningkat ini kita harapkan bisa membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan," ujar Menparekraf. • pan

## 16 Hari Jelang Tutup Buku, RI Kantongi Rp16 T dari Tax Amnesty Jilid II

JAKARTA (IM) - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II tersisa 16 hari lagi dari batas akhir 30 Juni 2022. Di sisa waktu ini tercatat harta yang dikantongi negara lewat pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 16,31 triliun.

Dikutip dari situs pajak.go.id, Selasa (14/6), jumlah PPh itu didapat dari 75.938 wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty jilid II. Sampai 13 Juni pukul 08.00 WIB, sudah ada 90.088 surat keterangan.

Dari 75.938 wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty jilid II, harta bersih yang diungkapkan senilai Rp 163,18 triliun. Terdiri dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi Rp 142,647 triliun, serta deklarasi luar negeri Rp 12,11 triliun.

Dari total tersebut, jumlah harta yang diinvestasikan mencapai Rp 8,42 triliun. Peserta tax amnesty jilid II ini bisa memilih untuk berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) atau berinvestasi di perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama mengingatkan para wajib pajak yang belum mengun-

gkapkan harta kekayaan untuk segera memanfaatkan program tax amnesty jilid II. Sebab, ada sanksi berat menanti jika ditemukan harta yang belum dilaporkan.

"Mengingatkan saja, konsekuensi dari dulu ikut tax amnesty, nah sekarang diberikan kesempatan untuk ikut PPS kebijakan I, tapi kalau kemudian masih ketinggalan lagi kita kembali ke Undang-undang Tax Amnesty Pasal 18," kata Hestu di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/5) lalu.

Besaran sanksi administrasi karena tidak melaporkan harta berada di rentang 200-300%. Denda 200% tersebut dijatuhkan ketika Kementerian Keuangan menemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) usai mengikuti tax amnesty jilid II.

Atas tambahan harta itu, maka dikenai PPh sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2017. Tarif PPh yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi 30%, dan wajib pajak tertentu 12,5%.

Rumusan sanksinya adalah tarif PP Nomor 36 Tahun 2017 x nilai harta baru + sanksi UU tax amnesty 200%. Sementara itu, sanksi 300% diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana. • vit